

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 30 Agustus 2023 Halaman: 1

BIRO TAPEM DIY

Sosialisasikan Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta

YOGYA (KR) - Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY menggelar Sosialisasi Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta dengan tema 'Optimalisasi Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Keistimewaan . DIY' di Hotel Pandanaran, Prawirotaman, Yogyakarta, Selasa (29/8). Kegiatan berlangsung dua sesi dengan mengundang masyarakat Brontokusuman, Mergangsan dan Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta. Analis Kebijakan Ahli

Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Tapem Setda DIY Nur Legawa mengatakan, kegiatan dimaksudkan untuk mendiseminasikan terkait peran masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta.



KR-Atiek Widyastuti H

Narasumber dalam Sosialisasi Kele<mark>mba</mark>gaan Asli Kota Yogyakarta <mark>yang dise-</mark> lenggarakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

"Semua masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam pembangunan," katanya.

Selama ini ada perbedaan dalam mengakses Dana Keistimewaan di kelurahan

dan kalurahan. Pemerintah Kalurahan bisa mengakses Dana Keistimewaaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten dan yang disalurkan langsung kepada Pemerintahan Kalurahan. Sedangkan Pemerintah Kelurahan hanya bisa mengakses Danais melalui mekanisme BKK yang disalurkan melalui Pemerintah Kota, karena kelurahan adalah bagian (perangkat) dari kemantren.

* Bersambung hal 7 kol 1

Sosialisasikan

"Harapannya Danais bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi di wilayah Kota Yogyakarta hingga tingkat kelurahan," ujamya.

Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, Purwanto Budi Santosa selaku civil society dan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

Menurut Purwanto, 93 persen di Kalurahan Brontokusuman dan Jetis masuk dalam Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Sumbu Filosofi. Bahkan di Bumijo 100 persen masuk dalam Kawasan SRS Sumbu Filosofi. Artinya mereka dapat mengajukan Danais, khususnya urusan tata ruang, kebudayaan dan pertanahan. "Masyarakat Kota Yogyakarta mungkin secara langsung belum pernah merasakan Danais. Tapi secara tidak langsung, sudah. Contohnya

Pemkot Yogyakarta telah merevitalisasi Pasar Prawirotaman dan itu menggunakan Danais. Tahun ini Pemkot melakukan revitalisasi Pasar Sentul," jelasnya.

Selama ini sebagian besar Danais lebih dimaksimalkan untuk fasilitas umum. Dengan mempertimbangkan sejauh mana tingkat mana yang paling mendesak.

Ketua Komisi A DPRD DIY tidak menampik jika belum semua kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi oleh Danais. Pengamanan sampah contohnya. Bisa dibilang dibandingkan empat kabupaten di DIY, permasalahan sampah di Kota Yogyakarta termasuk paling kompleks.

Dan tidak dipungkiri, sejauh ini anggarannya sangat kecil. Bahkan terkesan diserahkan kepada masyarakat. "Mereka mengolah secara mandiri tanpa

. Sambungan hal 1

adanya dukungan fasilitas. Kami dari DPRD DIY sudah pernah mengusulkan agar tiap bank sampah difasilitasi mesin pencacah sampah. Jadi, tidak sebatas imbauan memilah sampah saja. Tapi juga harus ada dukungan fasilitas," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko Suwanto juga menanggapi pernyataan dari peserta sosialisasi tentang kemungkinan Danais untuk melestarikan bahasa daerah. Karena menurut mereka, sejauh ini Danais lebih ke fisik dan kesenian saja. Padahal melestarikan bahasa Jawa juga tidak kalah penting.

"Untuk bahasa Jawa itu kewenangannya ada di Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sejauh ini ada kursus atau pelatihan yang dapat diakses masyarakat. Mulai dari usia dini hingga dewasa," jelasnya. (Awh)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MMNIP. 19690723 199603 1 005